

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut hingga saat ini sejak awal berdirinya Republik. Singkatnya, pasang surut demokrasi di Indonesia ini tak lepas dari tindakan para elitnya. Sikap miopik dan parokial ini disebabkan oleh lemahnya konstitusi Negara. Seni dan budaya pemerintah yang dianut oleh sebagian besar politisi di Indonesia. Indonesia sangat beruntung karena sejak awal mulanya berdiri, rakyatnya telah memilih untuk menganut sistem politik yang demokrasi untuk memerintah Negara yang baru lahir (Purba, 2015).

Demokrasi di sisi lain, juga berkaitan erat dengan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran. Kedamaian sejati hanya mungkin dapat dicapai ketika masyarakat menerapkan sistem demokrasi yang mengandung jaminan atas hak dan kewajiban orang lain. Demokrasi sendiri merupakan konsep dari praktik dan nilai komunikatif yang membebaskan karena berorientasi pada pembangunan tatanan masyarakat yang bebas, egaliter, adil, inklusif, dan toleran dalam rangka terwujudnya masyarakat yang beradab dan sejahtera (Supardan, 2015)..

Pada sebuah tatanan substantif-prosedural, demokrasi membuka partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Terlihat jelas bahwa kehidupan demokrasi mengandaikan kebersamaan kolektivitas bukan individualitas absolut. Sekalipun kualitas dalam kebebasan sipil ini dirasakan meningkat, namun problem dalam hak-hak politik serta aspek pada kelembagaan demokrasi di negeri ini membuat keseluruhan skor indeks demokrasi menurun seperti pada tahun-tahun sebelumnya, (Nainggolan,2021).

Dalam masa demokrasi, kebebasan berpendapat publik secara bertahap membuka ruang baru bagi individu untuk mengekspresikan pikiran dan keinginannya. Graffiti,

mural, dan bentuk seni jalanan lainnya telah digunakan untuk mengekspresikan tujuan kelompok kepentingan yang beragam melalui media partisipatif alternatif.

Mural merupakan lukisan pada dinding. Mural sendiri berasal dari kata *Murus* dalam bahasa Latin, yang memiliki arti dinding. Jadi, mural merupakan cara melukis atau menggambar di dinding, tembok, dan permukaan luas yang bersifat permanen.

Di Indonesia, kemunculan mural dapat ditemukan sejak periode revolusi. Pada dinding-dinding kota di wilayah Republik Indonesia yang sedang bergejolak, seperti tulisan-tulisan yang berada di gerbong kereta yang berisikan seruan upaya propaganda mendukung kemerdekaan. Mural memiliki peran penting dalam mendokumentasikan peradaban. Ukuran lukisan yang besar menarik perhatian publik yang membuatnya menjadi cara yang paling efektif dalam menyampaikan pesan. Secara tidak langsung, mural dapat mempengaruhi sikap orang-orang yang melihatnya. Apakah publik itu setuju atau tidak. Mural menunjukkan bahwa kekuatan ekspresi mural lah yang bisa menjadi sarana ekspresi sosial, dan ekspresi politik (Pramana & Irfansyah).

Fakta mengenai munculnya mural dikota-kota besar yang ada di Indonesia dengan pesan-pesan yang dibawah di dalam mural tersebut memberikan sebuah persepsi, bahwa mural tersebut merupakan salah satu ruang publik bagi anggota masyarakat. Menurut Habermas, semua wilayah atau ruang kehidupan sosial kita yang memungkinkan untuk membentuk opini (*public opinion*). Dinding jalanan yang dijadikan sebagai “kanvas” bagi masyarakat yang menjembatani pikiran-pikiran mereka melalui mural. Pikiran dan aspirasi yang berkaitan dengan persoalan sosial secara tidak langsung “disampaikan” melalui mural yang digoreskan di dinding (Satria, 2016).

Mural sebagai sarana dalam menyampaikan aspirasi atau kritik dalam mengatasi tantangan. Di era demokrasi saat ini, patut untuk dipertanyakan apakah masih ada pihak-pihak yang merasa gerah kepada kritik sosial yang disampaikan melalui mural.

Penggunaan mural sendiri sebagai sarana penyampaian aspirasi karena tidak efektifnya sistem penyampaian aspirasi secara formal dipemerintah. Sistem yang tidak mampu lagi menampung sehingga membuat sebagian masyarakat mencari media lain untuk menyuarakan aspirasinya. Dengan cara mengeskpos ke publik baik itu lewat daring maupun luring, termasuk mural. Kalaupun dalam via online tidak cukup, maka offline juga dapat dilakukan dengan poster dan mural (Hermawan.w,2021).

Hadirnya mural politik di berbagai ruang publik ini dikarenakan. Pertama, mural politik merupakan bagian dari representasi politik massa, ia hadir untuk mengisi ruang kosong partisipasi politik warga Negara yang selama ini absen atau tidak terakomodasi oleh saluran politik formal seperti partai politik. Pada umumnya, mural politik ini dibangun atas dasar kritik sosial. Kehadiran Mural tersebut hadir untuk memanfaatkan ruang-ruang publik yang sangat terbatas seperti tembok-tembok jalanan umum tanpa memerlukan biaya yang tinggi dan dengan peralatan seperlunya.

Kedua, menjamurnya mural politik sebenarnya adalah respon alamiah atas terjadinya kooptasi ruang publik terutama yang dilakukan oleh Negara dan pasar. Mural politik versi rakyat ini hadir untuk menjawab masifnya parade baliho yang sedang dimainkan oleh para elit politik diberbagai ruang publik. Jika di dalam baliho sering menghadirkan kesan formal dengan narasi yang masih samar-samar, maka mural politik bersifat ekspresif karena mural tidak hanya menghadirkan kritik sosial dan politik tetapi juga karya yang artistik.

Ketiga, munculnya mural politik juga dapat dibaca dalam konteks terjadinya perebutan ruang publik. Secara teoritis, *Habermas* (1962) sebenarnya telah menyediakan basis teoritik yang komprehensif terkait persyaratan ruang publik yang ideal. Mural bertema kritik sosial ini sebenarnya muncul secara alamiah ketika terjadinya penyumbatan terhadap ruang-ruang artikulasi kritik yang tersedia. Begitupun dengan

respon atas mural tersebut dan, bagaimana respon terbentuk bergantung pada bagaimana kekuasaan itu dibentuk dan dijalankan (Farcen.Y,2021)..

Mural yang hadir di ruang publik merupakan ekspresi estetis dan mempresentasikan warga kota, baik sebagai pengkritik maupun sebagai masyarakat biasa. Ekspresi dalam wujud mural di ruang publik tersebut dapat bermakna sangat pribadi, dan dapat pula merupakan ekspresi kolektif yang sarat dengan pesan dan maknanya yang dapat dipahami secara kolektif pula. Pemahaman secara komprehensif terhadap mural politik sebagai karya mural yang visual perlu didukung pemahaman kultural dan sosial, sehingga apa yang menjadi pesan dibalik representasi visual akan dapat ditangkap maknanya oleh publik dengan baik (Sambodo, 2011).

Kehadiran mural di ruang publik memiliki fungsi yang berbeda di setiap tempat, mural di ruang publik memiliki pandangan yang pro dan kontra di kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Ada yang suka dengan bentuk secara visual tetapi tidak tahu dengan maksud dan fungsi mural yang dibuat, ada juga yang tidak tahu sama sekali dengan apa itu mural, apalagi bentuk dan fungsi mural itu dibuat, sedangkan mural hadir dan berkembang ditengah-tengah lingkungan ruang publik itu sendiri. Seperti yang telah terjadi akhir-akhir ini mengenai mural yang dianggap sebagai kritikan atau penghinaan terhadap pemerintah dan berkurangnya rasa kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya (Riski, 2020).

Dalam satu atau dua bulan terakhir, kritik masyarakat dalam meluapkan eskpresinya menggunakan media tembok jalanan seperti mural, graffiti, hingga coretan vandal. Coretan yang berisi kritikan tersebut Sebagian besar telah dihapus oleh pihak yang berwenang, baik polisi maupun pemerintah daerahnya. Penghapusan mural ini telah terjadi di Jakarta, Bandung, tanggerang, Pasuruan dan, Banjarmasin. Penanganan kasus mural belakangan ini menimbulkan efek kecemasan pada warga sekitar, sehingga warga

sekitar takut untuk mengeluarkan pendapat kritis, meski sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Aparat melihat karya tersebut bukan sebagai cerminan atau keadaan masyarakat. Tetapi hanya sebagai entitas politik yang dilihat sebagai runtuhnya stabilitas ekonomi atau politik. Oleh karena itu, pemerintah menganggap karya seni sebagai produk yang melanggar aturan otoritas publik (Muthhar, 2021). Berdasarkan penjelasan diatas mengenai penghapusan mural politik, maka penulis tertarik untuk melihatnya dalam perspektif Teori Demokrasi *Deliberatif* yang digunakan sebagai ruang dalam berdemokrasi untuk pertemuan dan partisipasi politik, dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan hak-hak mereka, sehingga penelitian ini diberi judul **“Penghapusan Mural Politik Dalam Perspektif Teori Demokrasi *Deliberatif* (Studi Kasus Penghapusan Mural Politik di Indonesia).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yakni : Bagaimana penghapusan mural politik oleh Aparat pemerintahan dalam perspektif Teori Demokrasi *Deliberatif* ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan dari permasalahan yang ada ialah untuk mengetahui bagaimana penghapusan mural politik oleh aparat pemerintahan dalam persepektif Teori Demokrasi *Deliberatif*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penghapusan mural politik oleh aparat pemerintahan dalam perspektif Teori Demokrasi *Deliberatif*.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa referensi penelitian yang berkaitan dengan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan mural politik di Indonesia. Tujuan diadakannya tinjauan pustaka ini agar tidak adanya kesamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan peneliti yang lainnya. Beberapa tinjauan untuk memastikan keterkaitan atau perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka ada beberapa penelitian yang menyentuh ranah Penghapusan Mural Politik Dalam Perspektif Teori Demokrasi *Deliberatif* (Studi kasus Penghapusan Mural Politik di Indonesia).

Penelitian pertama diteliti oleh Aris Darisman (2014), *Karya Graffiti Sebagai Representasi Persoalan Sosial Di Kota Bandung*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kehadiran graffiti sebagai bagian dari cabang kesenian (seni rupa/visual) telah diakui sebagai bagian dari sejarah perkembangan seni rupa modern. Graffiti layaknya cabang kesenian yang lain memosisikan dirinya selain sebagai bagian dari hasil oleh daya kreativitas seniman, juga sebagai instrumen dalam menyuarakan kegelisahan yang dirasakan oleh senimannya, dan representasi dari berbagai persoalan sosial. Kota Bandung adalah kota yang sedang mulai tumbuh dan berkembang, terutama dari segi ekonomi, sekaligus sebagai pusat pemerintahan di wilayah Jawa Barat. Layaknya karakter sebuah kota dengan masyarakatnya yang cenderung lebih terbuka dan kritis, berbagai persoalan sosial yang kebanyakan terkait dengan kebijakan dan keputusan pemerintah setempat tidak jarang menjadi faktor penyebab timbulnya persoalan sosial. Di sini, karya graffiti muncul sebagai media yang mengkritisi berbagai kebijakan yang dirasa tidak mewakili persoalan keseharian masyarakatnya. Kehadiran graffiti sebagai karya seni ruang publik (*public space art/art in public space*), melalui pesan yang disampaikan, menjadi sebuah media komunikasi antara seniman-karya-audiens (masyarakat umum dan

juga stakeholder). Komunikasi yang terjalin dapat berupa kesadaran dan advokasi bagi masyarakat umum, juga kritik terhadap berbagai kebijakan dan keputusan dari pemegang kekuasaan (Darisman , 2014).

Penelitian kedua diteliti oleh Dima Maulida Kusmayadi (2015), *Kajian Visual Street Art Di Ruang Publik Kota Yogyakarta*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Street art sebagai salah satu bentuk komunikasi dan interaksi secara tidak langsung antara masyarakat dengan seniman. Menjadi bentuk sajian informasi akan kejadian sosial yang terjadi didalam ruang lingkup kota Yogyakarta. Sifatnya dalam mengisi ruang kosong pada dinding bangunan yang kurang terawat. Beberapa seniman bertanggung jawab atas karyanya, dari segi penempatan hingga pemilihan lokasi. Beberapa karya dengan tema sosial yang dianalisis ditempatkan pada lokasi yang sesuai dimana tema tersebut dapat dihubungkan dengan target audiensnya yang beragam sehingga penyampaian pesan dapat tersebar secara lebih luas (Kusmayadi, 2015).

Penelitian ketiga diteliti oleh Nisen Ndaru Ansori (2016). *Analisis Wacana Kritis Pada Street Art Mural (Studi Kasus Pada Komunitas Serikat Mural Surabaya)*. Hasil penelitian ini yaitu Street art mural adalah media yang digunakan untuk mengkritik permasalahan-permasalahan atau fenomena yang ada di Indonesia. Persoalan tersebut mencakup semua aspek yaitu sosial, politik, lingkungan, dan budaya menurut fakta yang terjadi di tengah masyarakat. street art mural juga dalam proses pembentukan wacananya sangat erat hubungannya dengan pemerintahan dan kehidupan masyarakat sehari-sehari. Street art mural menjadi simbol perlawanan bagi kaum minoritas terhadap kekuasaan yang sewenang- wenang. penggunaan media dinding atau media permanen lainnya pada street art mural memiliki keterbatasan dalam penyebaran informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Wacana pada media permanen seperti dinding tidak bergerak dan tidak

memiliki efek suara atau visual seperti pada media lain yaitu radio dan TV (Ansori, 2016).

Penelitian keempat diteliti oleh Septian Dwi Pujiyanto (2013), *Peran Street Art Pada Partisipasi Politik Para Seniman Jalanan*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa street art merupakan salah satu karya seni yang terdapat di ruang publik dengan kebebasan dalam berekspresi dan berkreatifitas para street artist, baik yang mengandung pesan atau hanya penyebaran identitas. Street art politik merupakan sebuah karya seni jalanan yang mengandung pesan berunsur politik. Para street artist pasti memiliki motif yang menyebabkan mereka melakukan aksi street art politik, memiliki karakteristik dalam pemilihan lokasi, dan memiliki tujuan atau alasan tertentu dalam memilih pesan yang akan disampaikan. Dengan kata lain, street artist yang memiliki ketiga kategori tersebut bukan street artist yang hanya sekadar berkarya di ruang publik, namun juga memiliki prinsip yang jelas dan lebih berani bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Karena aksi yang dilakukan para street artist ini masih banyak yang berpendapat vandalisme, sehingga pandangan negatif dari masyarakat selalu ditujukan kepada mereka. Padahal karya seni ini memiliki sisi positif yang seharusnya dapat dilihat oleh masyarakat salah satunya sebagai memperindah ruang publik yang sudah penuh dengan pengiklan. Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa karya street art baik politik atau tidak, seharusnya dapat dilihat lebih mendalam karena street art merupakan bentuk seni dan aktivisme dari masyarakat dan untuk masyarakat yang berada di ruang publik (Pujiyanto, 2013).

Penelitian kelima diteliti oleh Triliana Kurniasari (2013). *Eksistensi Graffiti sebagai Media Ekspresi Subkultur Anak Muda*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan komunikasi visual di kalangan anak muda, khususnya graffiti yang disajikan sebagai bentuk ekspresi diri namun kerap dianggap vandalisme

oleh masyarakat. Peneliti berusaha memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa graffiti selayaknya dihargai sebagai media komunikasi dan ekspresi anak muda yang menyajikan berbagai pesan mulai dari eksistensi individu hingga pesan sosial. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi agar writer mampu menyajikan graffiti yang bisa dipertanggungjawabkan, artinya memiliki konsep yang jelas dan mengandung pesan sosial sekaligus pesan visual sehingga bisa menimbulkan timbal balik yang lebih banyak dari khalayak. Dengan demikian fungsi sosial dan visual graffiti sama-sama bisa terpenuhi, yakni di satu sisi pesan pesan sosial mampu membangkitkan pemahaman bahwa graffiti bisa ditujukan sebagai media mengkritisi keadaan di lingkungan masyarakat. Sementara di sisi lain, secara visual graffiti dapat dimanfaatkan untuk memperindah lokasi (Kurniasari, 2013).

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori ruang publik dalam kerangka demokrasi *deliberatif* dari Jurgen Habermas. Karena teori ini berkaitan dengan fenomena tentang penghapusan mural, yang mana fenomena tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni salah satunya Demokrasi, dan dari demokrasi ini juga kita dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang yang luas, sehingga dari sekian banyak sudut pandang pada demokrasi tersebut penulis melihatnya dari sudut pandang praktek demokrasi. Dan dari praktek tersebut dapat kita lihat dari sudut pandang kritik, setelah melihat berbagai sudut pandang tersebutlah penulis dapat menentukan teori yang akan digunakan.

Jurgen Habermas adalah seorang ahli teori sosial dari Mazhab Frankfurt yang dikenal sebagai generasi kedua dalam teori kritis. Ia juga merupakan individu paling inovatif dan penting di generasi kedua Sekolah Frankfurt (Yuliarmini, 2021). Habermas tidak hanya

meneruskan silsilah instrukturnya, Adorno dan Horkheimer, serta rekannya Marcuse, tetapi ia juga menyimpang dari teori kritis klasik.

Permasalahan yang ada di dalam penelitian ini dikaji secara mendalam dengan teori ruang publik dari Jurgen Habermas pada *Between Fact and Norms* yaitu ruang publik dalam demokrasi *deliberatif*. Seperti dikatakan sebelumnya, ruang publik adalah lingkungan plural di mana setiap komunitas dan kelompok masyarakat dapat menciptakan ruang publiknya sendiri. Ruang publik dimasukkan sebagai bagian dari kerangka teoritis yang lebih besar tentang demokrasi *deliberatif*. Sistem demokrasi yang menitikberatkan pada urusan politik dikenal dengan istilah demokrasi deliberatif. (Yuliarmini, 2021).

Teori ruang publik *Jurgen Habermas* yang memuat pengertian demokrasi deliberatif dalam bentuk ruang publik informal sengaja dipilih dan digunakan karena sesuai dengan konteks penelitian. Karena setiap lingkungan dan organisasi masyarakat, menurut *Jurgen Habermas*, dapat menciptakan ruang publiknya sendiri.

Ruang publik diperlukan dalam demokrasi *deliberatif* karena digunakan untuk berbagi informasi tentang suatu isu yang harus ditangani (Yuliarmini, 2021). Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian karena individu menciptakan ruang publik mereka sendiri di kota-kota besar dengan melukis mural dan membawa informasi kepada politisi tentang isu-isu yang menuntut solusi

Teori tentang demokrasi deliberatif adalah suatu upaya untuk merekonstruksikan proses komunikasi dalam konteks Negara hukum Demokratis. Demokrasi sebagai suatu sistem politik dalam Negara hukum sesungguhnya tidak hanya sekedar terfokus pada dimensi tujuannya saja. Namun, penting diperhatikan juga tentang cara berdemokrasi yang benar.

Kata *Deliberatif* sendiri berasal dari bahasa latin yakni *Deliberatio* atau *Deliberasi* (Indonesia) yang merupakan konsultasi, musyawarah, atau menimbang-nimbang.

Demokrasi bersifat *Deliberatif* jika pemberian alasannya atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu melalui konsultasi publik, atau diskursus publik. Demokrasi *Deliberatif* ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga Negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah (Rahmat.H.T,2012).

Dalam demokrasi *Deliberatif*, keputusan mayoritas dapat dikontrol melalui kedaulatan rakyat. Masyarakat dapat mengkritisi keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh para pemegang mandat. Jika masyarakat telah berani mengkritisi kebijakan pemerintah, maka secara tidak langsung mereka juga telah menjadi masyarakat rasional bukan lagi masyarakat irasional. Opini publik atau aspirasi berfungsi untuk mengendalikan politik formal atau kebijakan-kebijakan politik. Dan jika tidak ada keberanian lagi untuk mengkritik kebijakan politik, maka masyarakat telah tunduk patuh terhadap sistem.

Menurut Habermas, ruang publik harus memenuhi dua persyaratan, yaitu bebas dan kritis. Bebas yang artinya setiap pihak dapat berbicara dimana pun, berkumpul dan berpartisipasi dalam debat politisi. Sementara itu kritis artinya siap dan mampu secara adil dan bertanggung jawab dalam menyoroiti proses pengambilan keputusan yang bersifat publik (Haliim, 2016). Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai berkumpulnya orang-orang untuk berdiskusi berdasarkan rasionalitas. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga Negaranya dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Selain itu, ruang publik merupakan wadah atau tempat yang mana warganegara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap Negara atau pemerintah.

Dalam demokrasi [deliberatif](#) terdapat tiga prinsip utama

1. prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait.
2. prinsip reasonableness, artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain, dan argumentasi yang dilontarkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
3. prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan, artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka serta kesediaan untuk mendengarkan.

Demokrasi yang deliberatif diperlukan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam [masyarakat Indonesia](#) yang heterogen. Jadi setiap kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah bukan dipaksakan. Deliberasi dilakukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya konflik kepentingan. Maka diperlukan suatu proses yang fair demi memperoleh dukungan mayoritas atas sebuah kebijakan publik demi suatu ketertiban sosial dan stabilitas nasional.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan teori Demokrasi *Deliberatif* karena menekankan pentingnya partisipasi publik yang sifatnya dialogis dan sintesis, dan secara bersamaan berupaya mencari kebenaran yang berakar pada fakta, peduli pada kepentingan masyarakat, dan tidak doktriner. Dalam demokrasi *Deliberatif*, kebijakan-kebijakan penting (perundang-undangan) dipengaruhi oleh diskursus-diskursus yang terjadi dalam masyarakat di samping kekuasaan administrative (Negara) dan kekuasaan yang ekonomis (kapital).

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ialah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Didalam metodologi ini juga melibatkan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode dan pembelajaran berbagai teknik yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian dan pelaksanaan tes, eksperimen, survei, dan studi kritis. Dapat dilihat tujuan dari metode penelitian ini ialah untuk menerapkan prosedur yang benar untuk menemukan solusi atau problem penelitian berikut ini metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

1. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data maupun hasil penelitian dalam bentuk Kajian Media. Kualitatif, yaitu berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrument), menggunakan metode kualitatif, data bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka)(Moleong, 2009). Stuart Hall (1972) menjelaskan bahwa kajian media dan budaya, atau yang lebih dikenal dengan *Media and Cultural Studies*, pada dasarnya mencoba untuk menggoyang keamanan berpikir kita tentang “realistis” dan apa yang dimaksud dengan “real” (yang sebenarnya) dalam kehidupan budaya kita sehari-hari. Kajian media adalah disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari [konten](#), [sejarah](#), dan pengaruh berbagai media, khususnya [media massa](#). Kajian media berasal dari tradisi [ilmu sosial](#) dan [humaniora](#) (Ida, 2014).

2. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang didapat berupa permasalahan pada penghapusan mural politik dalam perspektif Teori Demokrasi *Deliberatif* yang terdapat di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Tangerang, Pasuruan dan Banjarmasin. Maka informasi

mengenai sumber data yang didapat berasal dari pemberitaan berupa berita-berita cetak atau elektronik, rekaman-rekaman berita atau diskusi-diskusi yang ada di televisi maupun diyoutube yang memuat persoalan mural-mural politik dan penghapusan mural-mural tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang bersumber dari internet atau media digital. Kemunculan dan perkembangan internet, dan media sosial telah mengubah parameter interaksi sosial.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan bersumber dari internet atau media digital, dengan cara browsing ke internet lalu di download selanjutnya disimpan dan diberi nama berdasarkan jenis data dan pengelompokkannya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut sebagai cara dalam mengelolah data dan menafsirkan sebuah data. Analisis data merupakan sebuah kegiatan penelaah, pengelompokan, penafsiran dan verifikasi data agar fenomena ini memiliki nilai sosial akademis bahkan ilmiah.

Penulis menggunakan teknik analisa dengan cara mengumpulkan data yang dominan berupa pemberitaan dari media online. Untuk data yang berupa berita teknik analisa datanya dengan cara di pilah berdasarkan jenisnya mana yang dari media cetak dan, media online lalu mana yang berita tentang mural sendiri, berita tentang instansi pemerintah yang menghapus mural tersebut dan mana lagi data orang yang menanggapi masalah tersebut dari diskusi-diskusi, berita-berita tentang mural

tersebut. Setelah dikumpulkan data tersebut selanjutnya ditelaah. Dalam analisis kualitatif ada beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengelompokkan data-data dari media online dan media cetak, berita tentang mural itu sendiri, instansi pemerintah yang menghapus mural tersebut dan diskusi-diskusi, tanggapan-tanggapan yang dilakukan untuk menanggapi berita tentang penghapusan mural tersebut yang berkaitan dengan penghapusan mural politik oleh aparat pemerintahan dalam Perspektif Teori Demokrasi *Deliberatif*.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan yang dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data-data yang telah dikelompokkan diatas berdasarkan kelompok-kelompoknya, selanjutnya disusun secara sistematis.

c. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan cara menganalisis berdasarkan sudut pandang dari teori Demokrasi *Deliberatif*. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisa menggunakan konsep dari sudut pandang Demokrasi *Deliberatif*. Apakah fenomena di Indonesia berlawanan dengan demokrasi atau mendukung demokrasi dan apa pemerintah sendiri menunjukkan pemerintah Indonesia itu semakin bergerak ke otoriter.

d. Penarikan Kesimpulan

Sejak awal pengumpulan data, penulis telah mencatat dan mengumpulkan data-datanya berdasarkan kelompoknya, selanjutnya baru bisa dilakukan

penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis berdasarkan prosedur yang telah dilakukan .

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mendapatkan gambaran yang terperinci dan untuk mempermudah ini dari pada skripsi ini, sehingga penulis membagi sistematika penulisan ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang yang mendasari sebuah penelitian ini. Kemudian diidentifikasi masalah dengan adanya rumusan masalah. Lalu dijelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, selain itu terdapat tinjauan pustaka (Observasi) dan kerangka teori sebagai acuan dalam penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, data, jenis data, teknik pengumpulan data, dan lokasi penelitian.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

Bagian ini khusus membicarakan tentang berbagai materi yang berkaitan dengan topik yang dibahas

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di beberapa kota di Indonesia yang terjadi proses penghapusan mural politik, pada bab ini penulis menganalisis tentang Bagaimanakah Penghapusan Mural Politik Dalam Perspektif Teori Demokrasi *Deliberatif* (Studi Kasus Penghapusan Mural Politik Di Indonesia)

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengurai hasil dari rumusan masalah dalam penelitian Yang berbentuk deskriptif secara mendalam mengenai hasil dan fenomena yang didapat dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada peneliam ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran yang penulis dapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan.